

# **KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN PERPANJANGAN PENAHANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**CHARLES HADI MENDA**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perpanjangan waktu penahanan yang dimintakan oleh penyidik kepada penuntut umum atau hakim dengan alasan pemeriksaan belum selesai akan berpengaruh terhadap tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, untuk mengetahui fungsi koordinasi para penegak hukum dalam sistem perpanjangan penahanan pada perkara tindak pidana korupsi serta kewenangan, tugas, dan tanggungjawab para penegak hukum dalam pertanggungjawaban pidana atas penahanan tersangka/terdakwa perkara tindak pidana korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori penegakan hukum, teori asas praduga tak bersalah, dan teori asas pertanggungjawaban.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan sumber data yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perpanjangan waktu penahanan yang diminta penyidik dengan alasan pemeriksaan belum selesai akan berpengaruh terhadap tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi karena penahanan dipandang sebagai bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seorang pelaku tindak pidana. Sahnya perpanjangan waktu penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dilihat dalam delik-delik. Fungsi koordinasi para penegak hukum dalam system perpanjangan penahanan perkara tindak pidana korupsi terkandung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan, tugas dan tanggung jawab para penegak hukum dalam pertanggung jawaban pidana atas perpanjangan penahanan tersangka/terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berada pada kepolisian dan KPK.

Saran yang diberikan adalah mengingat dalam praktek peradilan terdapat penyimpangan yang terjadi pada tahapan penahanan tingkat penyidikan, maka diharapkan agar sarana dan prasarana dilengkapi oleh aparat kepolisian, disamping itu tetap memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa.

Kata Kunci : Perpanjangan Penahanan.

# **AUTHORITY LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES IN DOING EXTENSION OF DETENTION CORRUPTION**

**HADI CHARLES MENDA**

## **ABSTRACT**

This study was conducted to determine the extension of the detention period requested by the investigator to the public prosecutor or the judge for reasons not yet completed the examination will affect the suspect / defendant in a case of corruption. In addition, to determine the function of law enforcement coordination in the system extension of detention on corruption cases as well as the authority, duties and responsibilities of law enforcement in criminal responsibility for the detention of the suspect / defendant corruption cases. The theory used in this research is the theory of justice, law enforcement theory, the theory of the presumption of innocence, and the theory of the principle of accountability.

The method used is a normative juridical research is qualitative. This study refers to the legal norms contained in legislation and judicial decisions as well as the norms of life in society. While the data sources that primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.

Results of this study concluded that the requested extension of the detention time investigator for reasons not yet completed the examination will affect the suspect / defendant in a case of corruption as detention is seen as a form of deprivation of liberty to move a criminal. The validity of the extension of the detention time is objective and absolute, meaning that it can be seen in the offenses. Coordination of law enforcement functions in the system extension penahaman corruption cases contained in Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. Authority, duties and responsibilities of law enforcement officials in criminal liability on the extension of detention of suspects / defendants in corruption cases are the police and the KPK.

The advice given is given in judicial practice there are irregularities that occur at this stage of the investigation containment level, it is expected that the infrastructure is equipped by the police, in addition to taking into account the rights of the suspect / defendant.